



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN SYARAT ADIL BAGI WALI DALAM PERKAWIANAN  
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KUBU  
BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**FAKHRURROZI  
NIM : 11720114823**

**PROGRAM SI  
JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1442 H/ 2021 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Penerapan Syarat Adil Bagi Wali Dalam Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Hukum Islam”** yang ditulis oleh:

Nama : Fakhurrozi  
 NIM : 11720114823  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Meret 2021

Pembimbing Skripsi

**Irfan Zulfikar, M.Ag**  
 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN SYARAT ADIL BAGI WALI DALAM PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh:

Nama : **FAKHRURROZI**  
NIM : **11720114823**  
Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Selasa, 08 Juni 2021**  
Waktu : **08. 00 WIB**  
Tempat : **DARING/Online**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris

**Ilham Akbar, SH., MH**

Penguji I

**Dr. H. Johari, M.Ag**

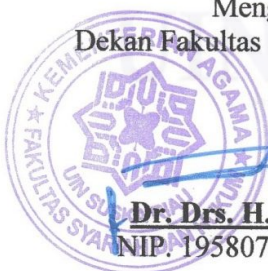
Penguji II

**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**

NIP. 19580712 1986031 005



## ABSTRAK

**FAKHRURROZI (2021): Penerapan Syarat Adil Bagi Wali dalam Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Hukum Islam.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir yang mayoritas masyarakatnya bermazhab Syafi'i tidak sesuai dengan penerapan syarat adil bagi wali menurut Imam Syafi'i. Penerapan syarat adil di sini bukan dilihat dari aspek tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil, dan menjaga *muru'ah* (kehormatan). Tapi, hanya dilihat dari aspek lahiriyah saja, mengenai satus agama dan hubungan kekerabatan dengan calon pengantin perempuan. Padahal di masyarakat tersebut masih ada yang melakukan dosa besar, dosa kecil, dan tidak menjaga *muru'ah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan syarat adil bagi wali tidak diterapkan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dan untuk mengetahui apakah faktor-faktor-faktor yang menyebabkan syarat adil bagi wali tidak diterapkan serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babussalam kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode deduktif dan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan syarat adil dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir hanya dilihat dari lahiriyah saja dengan didukung oleh data melalui KTP calon wali tersebut. Maka, jika ditinjau menurut pendapat Imam Syafi'i maka pernikahan nya batal. Namun dengan demikian, hukum Islam tidaklah bersifat kaku. Artinya, walaupun Imam Syafi'i mengatakan bahwa pernikahan seseorang yang walinya fasik adalah batal akan tetapi masih terdapat jalan keluar, dengan mengikut pendapat ulama lain diantaranya, pandangan Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa kewalian orang fasik tetap melekat padanya, artinya wali yang tidak adil atau fasik boleh menjadi wali nikah.

**Kata Kunci : Penerapan Syarat Adil, Bagi Wali, Dalam Perkawinan.**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta keberkahan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN SYARAT ADIL BAGI WALI DALAM PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad Saw. yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa ummatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Bakhtiar. R dan Ibunda tercinta Aminah, dan saudara-saudari saya (Zulfa, Pahriyah, Zulkarnain, Marzuki, dan Nurjannah), beserta seluruh keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do’a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak Dr. Hajar Hasan M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar M.CL selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku wakil dekan III beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak DR. H. Akmal Abdul Munir Lc, M.Ag Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag Selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.
6. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Bapak Muhammad Abdi Al Maktsur, M,Ag selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam, Bapak Firdaus, S.Ag beserta jajarannya yang telah meluangkan waktunya dalam kelancaran penelitian penulis.
9. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawannya yang telah menyediakan buku-buku literature kepada penulis.
10. Bapak dosen, Ibu dosen, Saudara/I, kerabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2017 yang telah menemani selama lebih kurang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat tahun, serta pihak yang memberikan jasa dan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, penulis aturkan do'a semoga Allah SWT. membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Aamiin.

Pekanbaru, 23 Februari 2021  
Penulis,

**FAKHRURROZI**  
**NIM. 11720114823**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>13</b>
A. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam.....	13
B. Visi dan Misi KUA .....	14
C. Gambaran Ketenagaan Kerja .....	14
D. Struktur Organisasi.....	15
E. Tugas dan Fungsi KUA.....	16
F. Prosedur Pendaftaran Nikah.....	17
G. Keagamaan.....	19
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN WALI DALAM PERNIKAHAN .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya .....	21
B. Rukun dan Syarat Nikah .....	29
C. Wali dalam Akad Nikah.....	32
D. Pendapat Ulama Tentang Syarat Adil Bagi Wali dalam Pernikahan.....	45



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
	A. Penerapan Syarat Wali Adil dalam Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam .....	52
	B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Persyaratan Wali Adil Tidak Diterapkan Pada Perkawinan Di KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir .....	55
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Wali Adil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam ...	56
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
	A. Kesimpulan .....	66
	B. Saran.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Kubu Babussalam....	15
Tabel. 2.2	Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Kubu Babussalam. ....	19
Tabel. 2.3	Rumah Ibadah yang Ada di Kecamatan Kubu Babussalam. ...	19
Tabel. 2.4	Organisasi Keagamaan yang Ada di Kecamatan Kubu Babussalam.....	20

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini telah disebutkan di dalam al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah SWT. termasuk manusia.<sup>1</sup> Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an surah Az- Zuriyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>2</sup> (QS. Az- Zuriyat:49).

Dalam *Tafsir Al-Qurtubi*, menjelaskan bahwa maksud ayat di atas adalah Allah SWT. Menciptakan segala sesuatu dua macam atau dua jenis yang berbeda. Ibnu Zaid mengatakan: misalnya adalah laki-laki dan perempuan, manis dan masam, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam surah Yasin: 36 juga dinyatakan:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet Ke-1, h. 12.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 522.

<sup>3</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi*, Terj. Ahmad Khatib, Jilid. 17, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 286.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*<sup>4</sup> (QS. Yasin: 36).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud (سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ)

(الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ) yaitu berupa tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman.

(وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ). Maksudnya ialah dimana Allah SWT. menjadikan mereka laki-laki

dan perempuan. (وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ) Maksudnya ialah berupa makhluk-makhluk lain

yang tidak mereka ketahui, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Adz-Dzaariyaat: 49. “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>5</sup>

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. berpasang-pasang inilah Allah SWT. menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan. Ketentuannya, dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang di sebut hukum perkawinan.

Dalam pasal 1 undang-undang perkawinan menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

<sup>4</sup> Ibid., h. 442.

<sup>5</sup> Abdul bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M Abdul Ihsan al-Atsari, Jilid. 8, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), h. 21-22.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.<sup>7</sup>

Agar tujuan dari perkawinan tercapai, maka prosesnya harus sesuai dengan syari'at terutama mengenai rukun dan syarat dalam perkawinan. Kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan itu dari segi hukum. Adapun unsur pokok atau rukun perkawinan ada lima yaitu, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi dan ijab qabul.<sup>8</sup> Salah satu dari rukun nikah tersebut adalah wali.

Kedudukan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Karena wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Syarat untuk menjadi wali nikah ialah Islam, telah dewasa, berakal sehat, laki-laki, merdeka, adil, serta tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.<sup>9</sup> Salah satu syarat bagi wali tersebut adalah adil.

<sup>6</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, 1999), h. 14.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.61.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syarat adil bagi seorang wali, terdapat ihtilaf di kalangan ulama. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa keadilan bukanlah syarat dalam menetapkan perwalian. Oleh sebab itu, misalnya bagi wali yang adil mau pun yang fasik dapat mengawinkan anak perempuannya atau keponakan perempuan dari saudara laki-lakinya karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya juga karena hak perwalian bersifat umum.<sup>10</sup>

Syaikh Muhammad bin Qasim al- Ghazy dalam kitabnya *Fathul Qarib Al- Mujib*, yang diterjemahkan oleh A. Hufaf Ibry mengatakan bahwa akad nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali yang adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).<sup>11</sup> Keharusan wali itu adil berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw. riwayat dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَوَلِيِّ مُرْشِدٍ. (رواه البيهقي)

Artinya: Dari ibn ‘Abbas, ia berkata: "Tidak sah pernikahan tanpa keberadaan dua orang saksi dan wali yang adil." (HR Imam Baihaqi).<sup>12</sup>

Menurut ulama golongan Syafi’iyah yang dimaksud dengan *mursyid* dalam hadis di atas adalah sifat *al- ‘adalah* (keadilan). Adil di sini adalah kelurusan agama dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama. Serta menghindari perbuatan dosa besar, seperti perbuatan zina, minum khamar,

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h. 187.

<sup>11</sup> Syaikh Muhammad bin Qasim al- Ghazy, *Fathul qarib Al- Mujib*, Terj. A. Hufaf Ibry (Surabaya: Al- Miftah, 2008), h. 543.

<sup>12</sup> Ahmad bin al-Husain ‘Ali bin Musa al-Khurasani al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 204.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan yang lain sejenisnya, serta tidak memandang remeh terhadap dosa-dosa kecil. Ini adalah syarat menurut mazhab Syafi'i dalam salah satu pendapat mereka dan mazhab Hambali.<sup>13</sup>

Masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir mayoritas beragama Islam dan bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i inilah yang biasanya menjadi rujukan masyarakat tersebut dalam menjalankan syari'at Islam, termasuk juga dalam persoalan perkawinan. Namun demikian, berdasarkan observasi penulis, penulis menemukan masih ada masyarakat mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang mengakibatkan syarat adil bagi wali menurut Imam Syafi'i tidak terpenuhi. Seperti mengerjakan dosa kecil dan ada juga yang mengerjakan dosa besar serta tidak menjaga *muru'ah*. Contohnya, seperti meninggalkan shalat dengan sengaja, meminum khomar, memfitnah, ghibah, dan lain-lain.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam judul skripsi "**PENERAPAN SYARAT ADIL BAGI WALI DALAM PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**".

## B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan masalah tersebut adalah penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Op. Cit.*, h.186.

KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sejak tahun 2017 hingga sekarang (2021).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babusslam Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan persyaratan wali adil tidak diterapkan pada perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babusslam Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tentang penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babusslam Kabupaten Rokan Hilir .
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan persyaratan wali adil tidak diterapkan pada perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babusslam Kabupaten Rokan Hilir.
  - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan syarat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adil bagi wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babusslam Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan penelitian
  - a. Untuk kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum secara khusus dan mahasiswa UIN SUSKA secara umum.
  - b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan dalam menjalankan proses pernikahan yang sah menurut Islam mengenai konsep keadilan wali dalam pernikahan dan harapannya ada standarisasi adil bagi wali nikah di KUA.
  - c. Sebagai penyelesaian akhir dalam mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### E. Metode Penelitian

Adapun untuk metode penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari KUA Kecamatan Kubu Babusslam Kabupaten Rokan Hilir terhadap penerapan wali adil dalam perkawinan, sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis menemukan ketidak sesuaian antara teori dan praktek dalam penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Kubu Babusslam Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.

### 3. Subjek dan objek penelitian

#### a. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam penelitian, yaitu, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir beserta staff.

#### b. Objek penelitian

Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

### 4. Populasi dan sampel

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.<sup>14</sup> Oleh sebab itu populasi dalam penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir beserta staff. Ada pun jumlah popolasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 3 orang. Karena populasinya hanya sedikit maka penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menggunakan teknik *total sampling*.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-3, h. 77.

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 134.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Sumber data penelitian

Sumber data adalah subjek dimana data dapat di peroleh. Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyusunan laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun data ini diperoleh langsung melalui sebuah proses pengamatan (observasi) dan wawancara terhadap subyek yang dituju.<sup>16</sup> Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada kepala KUA yang telah ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai pihak/sumber yang dapat memberikan informasi pendukung dalam penulisan ini serta buku-buku dan kamus yang ada hubunganya dengan penelitian ini.

## 6. Teknik pengumpulan data

Untuk pengumpulan data yang akurat dengan guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>18</sup> Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik dan Ilmu sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 118.

<sup>18</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2015), Cet. Ke-2, h 372.

<sup>19</sup> Sugiono, *Loc. Cit.*, h. 306.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>20</sup>

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar dan lain sebagainya.

#### 7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penganalisaan dan digambarkan dalam bentuk uraian.

#### 8. Teknik penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan ditulis dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### a. Deduktif

Deduktif yaitu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan-kesimpulan secara khusus;

##### b. Deskriptif

Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan-keadaannya.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 314.

BAB I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II gambaran umum tentang lokasi penelitian, yang terdiri dari sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam, visi, struktur organisasi, gambaran tenaga kerja, tugas dan fungsi KUA, dan prosedur pendaftaran nikah.

BAB III tinjauan umum tentang perkawinan dan perwalian, membahas tentang: pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian wali nikah dalam perkawinan, pendapat ulama tentang syarat adil bagi wali dalam perkawinan.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan: Bagaimana penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dan faktor-faktor yang menyebabkan persyaratan wali adil tidak diterapkan pada perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan syarat adil bagi wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir .

BAB V penutup: Terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu Babussalam terletak di jalan Sudirman Desa Sungai Majo Kabupaten Rokan Hilir. KUA tersebut berdiri pada tahun 2017. Selama terbentuknya KUA Kecamatan Kubu Babussalam sampai sekarang yang pernah menjabat sebagai kepala Kantor adalah:

1. Drs. H. Panusunan (2017-2020)
2. Firdaus, S.Ag (2020- sekarang)

Luas tanah KUA Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir seluas 15x80 m<sup>2</sup>. Luas bangunannya 8x12 m<sup>2</sup>, dan luas halaman nya sekitar 5m<sup>2</sup>. dan berstatus sewa. KUA Kecamatan Kubu Babussalam Mewilayahi 12 kelurahan/kepenghuluan, yaitu:

1. Rantau Panjang Kiri
2. Rantau Panjang Kiri Hilir
3. Sungai Masjo
4. Teluk Nilap
5. Sungai Pinang
6. Jojol
7. Sungai Panji-Panji
8. Pulau Halang Muka

9. Pulau Halang Belakang
10. Sungai Majo Pusako
11. Pulau Halang Hulu
12. Teluk Nilap Jaya

## B. Visi dan Misi KUA

### 1. Visi:

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam yang taat beragama, handal, rukun cerdas, dan mandiri”

### 2. Misi:

- Mewujudkan masyarakat yang taat menjalankan agamanya.
- Meningkatkan tatanan masyarakat yang rukun dan toleran.
- Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- Mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan & akuntabel.

### 3. Moto

“Ciptakan *image* yang sempurna”

## C. Gambaran Ketenagaan Kerja

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir adalah di bawah naungan dari Kementrian Agama, sehingga dapat dikatakan pusat pemerintahan yang menaungi dan melayani masyarakat untuk menjadi lebih baik. Berdasarkan data dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam karyawan yang berada di Kantor tersebut berjumlah lima orang, sedangkan pegawai yang mengurus dan memberikan bimbingan kepada calon



pengantin berjumlah 2 orang, sedangkan karyawan yang bekerja sebagai clening servis berjumlah 2 orang dan Pegawai Pembantu Pencatatan Perkawinan yang menangani disetiap desa sebanyak 1 orang.

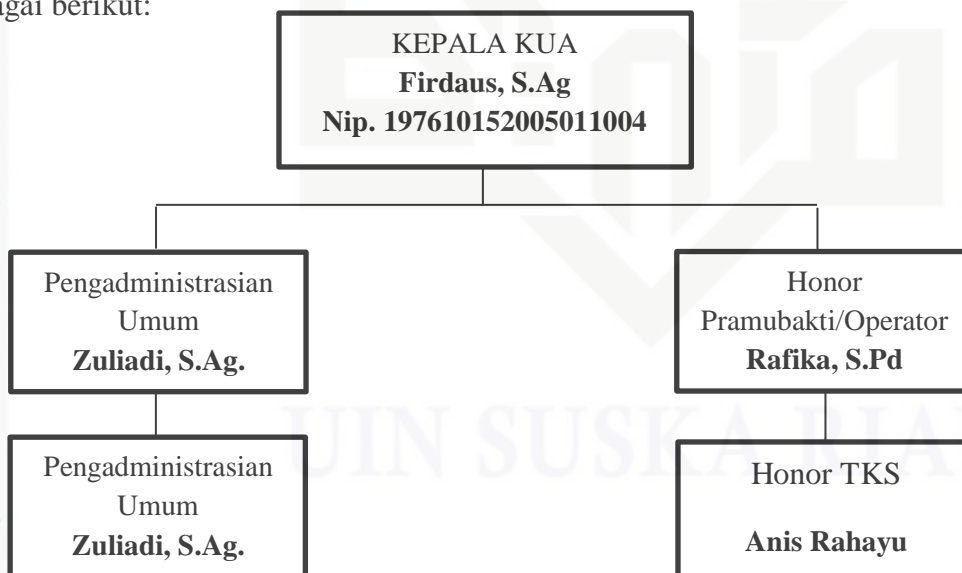
**Tabel. 2.1**  
**Daftar Nama Pegawai KUA Kecamatan Kubu Babussalam.**

NO	NAMA	JABATAN
1	Firdaus, S.Ag.	Kepala KUA/Penghulu Madya
2	Zulaidi, S.Ag.	Pengadministrasian Umum
3	Rafika, S.Pd.	Honor Pramubakti/Operator
4	Risna Pri Hartini, SE	Honor Pramubakti
5	Anis Rahayu	Honor TKS

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam Tahun 2020.

#### D. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Kubu Babussalam adalah sebagai berikut:



## E. Tugas dan Fungsi KUA

### 1. Tugas KUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No.34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tugas KUA Kecamatan Adalah Melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.<sup>21</sup> Maka, berdasarkan peraturan tersebut tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di kecamatan tersebut.

### 2. Fungsi KUA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas (dalam pasal 2 (dua), Kantor Urusan Agama kecamatan Kubu Babussalam menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaa pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolahan dokumentasi dan sistem informasi menejemen KUA kecamatan;
- d. Bimbingan pelayanan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyah dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;

<sup>21</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan;<sup>22</sup>
- j. Pelayanan bimbingan manasik haji.<sup>23</sup>

## F. Prosedur Pendaftaran Nikah

1. Calon pengantin datang ke KUA Kecamatan Kubu Babussalam untuk mengisi formulir pendaftaran nikah yang telah disediakan.
2. Waktu pendaftaran minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah.
3. Membawa persyaratan nikah berupa, yaitu:
  - N-1, N-2 dan N-4 dari Kelurahan/Kepenghuluan.
  - Foto Kopy KTP dan KK Masing-masing 1 lembar.
  - Pas photo ukuran 2 x 3 cm = 6 lembar, 4 x 6 cm = 1 lembar dengan latar belakang biru.
  - Surat pernyataan belum pernah menikah.
  - Surat izin orang tua ( Model N-5 ) bagi yang belum berumur 21 tahun.
  - Dispensasi dari camat jika pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari kerja dari pendaftaran.
  - Surat dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang berumur dibawah 19 tahun untuk catin laki-laki dan 16 tahun untuk catin perempuan.
  - Akta cerai dari Pengadilan Agama bagi duda/janda cerai hidup.
  - Surat keterangan kematian bagi duda/janda cerai mati.

<sup>22</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>23</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang ingin berpoligami.
- Rekomendasi pindah nikah bagi calon yang berasal dari luar Kecamatan Kubu.
- Surat Izin Kawin ( SIK ) dari atasan bagi anggota TNI dan Polri.

Bagi Warga Negara Asing ( WNA ), maka persyaratannya adalah :

- Foto Kopy pasport 1 lembar.
- Identitas diri dari negara asalnya yang mengatur tentang persyaratan nikah menurut ketentuan yang berlaku di negara tersebut .
- Surat Keterangan/Izin dari kedutaan atau perwakilan diplomatik dengan melegalisasi persyaratan di atas.
- Segala dokumen yang menggunakan bahasa asing telah diterjemahkan dan telah disumpah.

Berikut perincian dari Surat Model N :

- 1) Model N1 : Surat Keterangan untuk Menikah
- 2) Model N2 : Surat Keterangan Asal Usul Catin
- 3) Model N3 : Surat Persetujuan untuk Menikah
- 4) Model N4 : Surat Keterangan Orang Tua Catin
- 5) Model N5 : Izin Orang Tua untuk menikah 6) Model N6 : Surat Kematian

4. Setelah persyaratan pernikahan lengkap, kedua mempelai dan wali nikah datang ke KUA Kecamatan Kubu Babussalam untuk menjalani pemeriksaan nikah.



5. Kedua mempelai wajib mengikuti Kursus Calon pengantin (Suscatin) sebelum pelaksanaan akad nikah dengan jadwal yang ditetapkan.

## G. Keagamaan

Dalam masalah Agama di daerah ini, terutama penduduk asli, 100% beragama Islam. Sedangkan yang beragama non Islam hanya sebagian kecil masyarakat pendatang, seperti transmigran. Untuk itu lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel. 2.2**  
**Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Kubu Babussalam.**

NO	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ISLAM	11.687	17.074	28.761
2	KRISTEN	201	402	603
3	KATOLIK	47	66	113
4	HINDU	-	-	-
5	BUDHA	4	6	10

Sumber: KUA Kecamatan Kubu Babussalam tahun 2020.

Di samping itu, Juga ada beberapa tempat ibadah seperti Masjid, Mushollah, Gereja dan Wihara. Selain itu, masyarakat yang ada di kecamatan aktif di berbagai organisasi keagamaan. Adapun jumlah rumah ibadah dan organisasi keagamaan di Kecamatan Kubu Babussalam dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel. 2.3**  
**Rumah Ibadah yang Ada di Kecamatan Kubu Babussalam**

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	26
2	Mushalla	30
3	Gereja	4
4	Wihara	7
5	Pura	-

Sumber: KUA Kecamatan Kubu Babussalam Tahun 2020.

**Tabel. 2.4**  
**Organisasi Keagamaan yang Ada di Kecamatan Kubu Babussalam.**

No	Nama Organisasi	Ketua	Alamat
1	LPTQ	H. Gamal Bacik, SE	Rantau Panjang Kiri
2	MUI	Syafrizal, MA	Rantau Panjang Kiri Hilir
3	DMI	M. Syarqowi, S.Pd.I	Rantau Panjang Kiri
4	NU	Usman Saufi, M.Pd	Sungai Pinang

Sumber: KUA Kecamatan Kubu Babussalam Tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN WALI

### DALAM PERNIKAHAN

#### A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan (النِّكَاح) dan (الزَّوَاج). Secara harfiah, *an-Nikah* berarti (وَطَاءٌ-يُطَاءُ-وَطَاءً), (الْوُطْءُ), dan (الْجَمْعُ) *Al-wath'u* berasal dari kata (وَطَاءٌ-يُطَاءُ-وَطَاءً) artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>24</sup>

*Al-dhammu*, yang terambil dari akar kata (ضَمَّ-يَضُمُّ-ضَمًّا) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.<sup>25</sup> Sedangkan *al-Jam'u* yang berasal dari akar (جَمَعَ-يَجْمَعُ-جَمْعًا) berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-Jima'*, mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-Jam'u*.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. Ke-14, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1461.

<sup>25</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. Ke- 1, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h. 42-43.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 43.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>27</sup> Dengan demikian maka nikah secara *etimologis*, berarti akad, berkumpul, dan bersetubuh. Sementara itu menurut *terminologis*, nikah ialah akad yang mengandung halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan berkewajiban tolong-menolong serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.<sup>28</sup>

Sedangkan nikah menurut Syara' ialah Akad (ijab dan qabul) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>29</sup>

Selain itu, di kalangan ulama Syafi'iyah merumuskan pengertian nikah, yaitu:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ

Artinya: Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij.<sup>30</sup>

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul. Sedangkan sebelum akad maka di antara keduanya tidak boleh bergaul.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. Ke- 4, h. 962.

<sup>28</sup> Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. Ke-1, h. 174.

<sup>29</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), Cet. Ke- 1, h. 1.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin., *Op. Cit.*, h. 37

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 38.



Defenisi tersebut mengandung maksud sebagai berikut:

*Pertama*, penggunaan lafaz عَمْدٌ untuk menjelaskan bahwa perkawinan

itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

*Kedua*, penggunaan ungkapan يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ yang mengandung

maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Diantara yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.

*Ketiga*, menggunakan kata بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ yang berarti menggunakan

lafaz *nakaha* dan *zawaja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *nakaha* dan *zawaja*, oleh karena dalam awal Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga perbudakan. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tapi menggunakan kata *tasarri*.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>33</sup>

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2).<sup>34</sup>

Ungkapan: akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam rumusan UU tersebut yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam UU tersebut. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Dari pengertian-pengertian di atas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya syariat Islam itu bersumber dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, nikah

<sup>33</sup> Muhammad Amin Summa, *Op. Cit.*, h. 203.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, h. 14.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami isteri, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Adapun dasar hukum pernikahan terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits. Di antaranya Allah SWT. berfirman dalam Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”*.<sup>35</sup> (Q.S.An-Nuur: 32).

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya *Al-Munir* menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah penjelasan tentang sejumlah hukum dan perintah. Yang pertama adalah perintah untuk menikah. Wahai para wali dan majikan, atau wahai umat seluruhnya, nikahkanlah para laki-laki dan perempuan merdeka diantara kalian yang berstatus single (tidak bersuami atau beristri) juga para budak laki dan budak perempuan kalian yang sudah memiliki kompetensi untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan, dengan bekerja sama, bersinergi dan menghilangkan berbagai aral rintangan. Bantulah mereka untuk menikah dalam bentuk keuangan, tidak menghalang-halangi dan merintangi mereka untuk menikah, menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menikah.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, h.354.

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid. 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 514.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pesan ayat ini adalah ditujukan kepada para wali. Ada juga yang mengatakan kepada para suami. Zahir perintah ayat ini menurut jumhur adalah perintah yang bersifat sunnah dan anjuran. Sebab pada masa Rasulullah Saw. dan masa-masa setelah itu ditemukan banyak kaum laki-laki dan perempuan yang tidak menikah, sementara tidak ada seorang pun yang mengingkari, menolak dan mengecam kondisi tersebut.<sup>37</sup>

Dari penjelasan di atas, sudah jelas bahwa nikah itu adalah dianjurkan bahkan menurut Wahbah Az-Zuhaili para wali itu di perintahkan untuk membantu orang yang dibawah kewaliannya untuk menikah dalam bentuk keuangan, tidak menghalang-halangi dan merintangi mereka untuk menikah, menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menikah.

Hal ini juga selaras dalam *Tafsir Ibnu Katsir* bahwa ayat di atas mencakup hukum-hukum yang muhkam dan perintah-perintah yang pasti, yaitu; anjuran untuk nikah dan membantu laki-laki yang belum beristri dan perempuan-perempuan yang belum bersuami agar mereka kawin, termasuk juga budak-budak sahaya yang layak dan sudah cukup usia, hendaklah dibantu mereka dikawinkan dan janganlah sekali-kali kemiskinan dijadikan penghalang untuk kawin. Allah berfirman, bahwa jika suatu kawin berada dalam keadaan tidak mampu, orang itu akan di berikan rezeki dan kemampuan dengan karunia Allah dan rahmat-Nya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 514.

<sup>38</sup> Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 468-469.



Di dalam hadits Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al-A'masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah, dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Al-Qamah dan Al-Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak ada sesuatu pun, maka Rasulullah saw bersabda kepada kami : "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu merupakan tameng yang dapat meredakan nafsunya." (HR. Bukhari).<sup>39</sup>

Dalam hadis lain juga dinyatakan:

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ حَمِيدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Humaid Bin Abdul Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas Bin Malik berkata: bahwa Rasulullah Saw bersabda: perkawinan adalah sunnahku barang siapa yang benci pada sunnahku maka ia bukanlah umatku. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>40</sup>

Pada dasarnya hukum perkawinan itu adalah boleh (*Mubah*), tetapi hukum itu dapat berubah menjadi lima hukum (*Ahkamul Khamsah*), sesuai dengan keadaan, yaitu:

<sup>39</sup> Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dharul Ibnu Hasim, 2004), Cet. Ke-1, h. 615.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 615.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksanakan kecuali dengan kawin.
- b. Haram, Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban bathin seperti mencampuri istri.
- c. Sunnah, Nikah disunahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. Makruh, yaitu bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
- e. Mubah, Nikah dibolehkan bagi orang yang tidak ada halangan untuk kawin dan dorongan untuk nikahpun belum membahayakan dirinya, ia belum wajib kawin dan tidak haram bila tidak kawin.<sup>41</sup>

Dengan demikian, pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup.

---

<sup>41</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Terj. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 6.

## B. Rukun dan Syarat Nikah

Secara *etimologis*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sahnya suatu amalan (pekerjaan).<sup>42</sup> Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>43</sup>

Secara *terminologis*, yang di maksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>44</sup> Ada juga berpendapat bahwa syarat yaitu sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.<sup>45</sup>

Rukun dalam *terminologis* fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>46</sup> Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya,

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, h. 966.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 1114.

<sup>44</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. Ke- 4, h. 50.

<sup>45</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 59.

<sup>46</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.<sup>47</sup> Rukun Perkawinan ada lima, yaitu:

1. Adanya calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Dewasa
  - d. Jelas orangnya
  - e. Dapat memberika persetujuan
  - f. Tidak sedang berihram haji/umrah
  - g. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Adanya calon istri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Perempuan
  - c. Dewasa
  - d. Jelas orangnya
  - e. Tidak sedang berihram haji/umrah
  - f. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
  - g. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain.
  - h. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
  - i. Bukan mahram calon suami.
  - j. Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adanya wali dan syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Adil
  - e. Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
  - f. Tidak terdapat halangan perwaliannya
5. Adanya saksi, syarat-syaratnya:
  - a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Muslim
  - c. Adil
  - d. Aqil baligh
  - e. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
  - f. Hadir dalam Ijab Qabul
  - g. Dapat mengerti maksud akad
  - h. Dewasa
6. Pengucapan sighat ijab qabul, syarat-syaratnya:
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c. Memakai kata-kata Nikah, Tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*
  - d. Antara Ijab dan Qabul bersambungan

<sup>48</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke- 1, Jilid 1, h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Antara Ijab dan Qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang berkait dengan Ijab Qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
- g. Majelis Ijab dan Qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>49</sup>

### C. Wali dalam Akad Nikah

#### 1. Pengertian wali

Adapun pengertian wali menurut bahasa (*lughat*) yaitu kata wali berasal dari bahasa Arab yaitu, (الْوَالِي) atau (وَالِي) yang jamaknya (أَوْلِيَاءُ) artinya penguasa atau wali.<sup>50</sup> Pengertian wali secara *etimologis*, wali berarti penjaga, pelindung, penyumbang, teman, pengurus, dan juga digunakan dengan arti keluarga dekat.<sup>51</sup> Sedangkan secara *terminologis*, menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang tergantung padanyasah akad nikah, maka tidak sah (nikah) tanpa dia.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.71-72.

<sup>50</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Wacana Intelektual, 2015), h..338.

<sup>51</sup> Syafiq A. Mughni, *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Cet. Ke-1, h. 161.

<sup>52</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, h. 29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada juga berpendapat wali itu mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.<sup>53</sup>

Arti-arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin (b), Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain. Secara umum wali yaitu seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan

---

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-3, h.165.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>54</sup>

## 2. Kedudukan wali dalam pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam mendudukkannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat.

Berbeda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan. Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang jelas secara *ibarat al-nash* (petunjuk kalimat/lafal) kepada pengertian yang dikehendaki sesuai dengan apa yang dituturkan

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 69.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung oleh kalimat itu sendiri) yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam al-Qur'an terdapat petunjuk nash yang *ibarat* nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di samping itu, terdapat pula ayat-ayat al-Quran yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendidri perkawinannya. Di antara ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ ....

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf"...*<sup>55</sup> (Q.S. al-Baqarah: 232).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan ayat di atas, bahwa Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang mentalak istrinya dengan talak satu atau dua, kemudian istrinya menjalani *iddah* hingga selesai. Setelah itu, terfikir olehnya keinginan untuk menikahi dan merujuknya kembali. Maka si wanita itu pun mau menerimanya, tetapi para walinya melarang hal itu. Lalu Allah SWT. melarang mereka menghalang-halangnya. Hal yang sama juga diriwayatkan dari al-Aufi, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas pula.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, h.37.

<sup>56</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghafar E.M, Jilid. 1, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017), h. 592.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian juga yang dikatakan Masruq, Ibrahim an-Nakha'i, az-Zuhri, dan adh-Dahhak, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan dengan peristiwa tersebut. Dan mereka pun berkata: inilah zahir (makna yang tampak jelas) dari ayat tersebut. Dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa, seorang wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri, tapi harus ada wali baginya dalam pernikahan.<sup>57</sup>

Selain itu Allah SWT. juga berfirman di dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Kawinkanlah bujangan-bujangan yang telah layak untuk kawin dari antara budak laki-laki dan perempuan kamu. Jika mereka miskin, Allah kelak akan memberikan kecukupan kepada mereka dari rizki-Nya dan Allah Maha luas (rizki-Nya) dan Maha tahu.”<sup>58</sup> (Q.S. an-Nur: 32).

*Khithaab* atau pesan dalam aayat ini adalah ditujukan kepada para wali. Merekalah yang diperintahkan untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwalian mereka, baik perempuan yang berada di bawah perwalian mereka itu sudah besar maupun masih kecil, baik ia rela dan setuju maupun tidak. seandainya bukan karena adanya sejumlah dalil lain dari as-Sunnah yang menjelaskan bahwa seorang wali tidak boleh menikahkan perempuan janda yang sudah besar yang berada di bawah

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 592.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h.354.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwaliannya tanpa kerelaan dan persetujuannya, niscaya hukumnya sama dengan hukum gadis yang sudah besar karena keumuman ayat ini.<sup>59</sup>

Akan tetapi Rasulullah Saw. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i dari Ibnu abbas r.a, "*Perempuan yang masih gadis dimintai izinnya menyangkut dirinya, dan izinnya adalah diamnya.* (HR. Muslim, Abu Dawud, dan an- Nasa'i). Hadis ini menunjukkan kewajiban untuk meminta izin kepada gadis serta diperhitungkannya kerelaan dan persetujuannya. Dengan begitu, hadis ini membatasi keumuman ayat di atas. Ulama Syafi'iyah menjadikan ayat ini sebagai landasan bahwa seorang perempuan tidak boleh melaksanakan akad nikah. Sebab yang diperintahkan untuk menikahnya adalah walinya.<sup>60</sup>

Kalau dilihat sekilas, *lbarat nash* kedua ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk kawin, ayat kedua suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam kedua ayat itu berkenaan dengan perkawinan di alamatkan kepada wali, dapat pula dipahami dari padanya keharusan adanya wali dalam perkawinan. Dari pemahaman kedua ayat tersebut jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 515.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 156.

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h.70-71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini diperkuat lagi dengan hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Artinya: Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anha bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang lakilaki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. "Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.<sup>62</sup>

Dalam hadis lain Rasulullah Saw. juga bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه ابن حبان)

Artinya: Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anha bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Ibnu Hibban).<sup>63</sup>

3. Orang-orang yang berhak menjadi wali

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok,

yaitu:

a. Wali nasab

Wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Dalam menetapkan wali nasab

<sup>62</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, (Bairut-Libanon: Dar al-Fikri, 1994, h. 50.

<sup>63</sup> Amir Alaidin Ali, *Shahih Ibnu Hibban*, Jilid V, (Bairut-Libanon: Dar al-Fikri, 1996), h. 310.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali. 'Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhah-iriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

*Pertama:* wali dekat atau *wali qarib*, yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali *mujbir*. Ketidak harusan minta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan.

*Kedua:* wali jauh atau *wali ab'ad*, yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek. Ada pun *wali ab'ad* adalah sebagai berikut:

1. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
2. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
3. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
4. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
5. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
  7. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  8. Anak paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
  9. Ahli waris keluarga lainnya kalau ada.
- b. Wali *mu'tiq*

Wali *mu'thiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya. Oleh karena hamba sahaya sekarang sudah tidak ada lagi, maka wali semacam ini sudah tidak ada lagi di Indonesia atau bahkan dunia.<sup>64</sup>

- c. Wali hakim

Wali hakim yaitu, kepala negara yang beragama Islam, dalam hal ini biasanya di Indonesia dilakukan oleh kepala Pengandilan Agama (PA). seorang wali hakim dapat mengangkat orang lain orang lain menjadi hakim (biasanya yang diangkat adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan) untuk mengkad nikahkan perempuan yang berwali hakim. Ada pun sebab- sebab perempuan yang berwali hakim, yaitu:

1. Tidak ada wali nasab
2. Wali yang lebih dekat (*aqrab*) tidak memenuhi persyaratan menjadi wali, sedangkan wali yang lebih jauh (*ab'ad*) tidak ada.
3. Wali yang lebih dekat *ghoib* sejauh perjalanan syafar yang membolehkan mengqasar sholat.

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 75-76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wali yang lebih dekat sedang mengerjakan haji atau umrah.
5. Wali yang lebih dekat masuk penjara atau tidak dapat di jumpai.
6. Wali yang lebih dekat menolak atau tidak mau menikahkan.
7. Wali yang lebih dekat hilang dan tidak di ketahui tempat tinggalnya.<sup>65</sup>

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu.<sup>66</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai) dan sebagainya".<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), h. 437-438.

<sup>66</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajaawali Pers, 2009), Cet. Ke- 2, h. 89-90.

<sup>67</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 48-49.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Syarat wali

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Ulama menggunakan dalil al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar perwalian. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil.<sup>68</sup>

Amir Syarifuddin di dalam bukunya menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi wali, yaitu:

- a. Telah dewasa dan berakal sehat. Artinya anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b. Laki-laki. Artinya tidak boleh perempuan menjadi wali.
- c. Muslim. Artinya tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untu Muslim.
- d. Orang merdeka.
- e. Berfikiran baik. Artinya orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena di khawatirkan akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- f. Adil. Artinya tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara *muru'ah* atau sopan santun.
- g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), Cet. Ke-1. h.279.

<sup>69</sup> Amir Syarifuddi, *Op. Cit.*, h. 76-78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Dr. Peunoh Daly juga menyebutkan dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu:

- a. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
- b. Gila, apabila wali akrab gila maka berpindah kewalian kepada wali *ab'ad*.
- c. Budak.
- d. Fasik, kecuali ia sebagai imam *a'zam* (sultan).
- e. Masih berada dibawah pengawasan wali (*mahjur'aih*) karena tidak cerdas (*dungu*).
- f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut diselidiki.
- g. Berbeda Agama.<sup>70</sup>

Kalau terdapat salah satu dari hal-hal yang tersebut pada seseorang wali, maka berpindahlah hak kewalian itu kepada wali *ab'ad*. Wali akrab yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tidak boleh pula mewakili kepada orang lain. Dikala itu Sultanlah yang menjadi walinya, bukan wali *ab'ad* yang berikutnya, karena wali akrab itu tidak gugur kewaliannya ketika ihram, hanya tidak sah melakukan akad.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 76-78.

<sup>71</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 76-77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.<sup>72</sup>

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.<sup>73</sup>

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, dalam pasal 12 ayat dua (2) menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi wali itu adalah beragama Islam, Laki-laki, baligh, merdeka, berakal dan adil.<sup>74</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, adil (tidak fasik) dan tidak dicabut hak kewaliannya.

<sup>72</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>73</sup> Said Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawunan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. Ke- 1, h. 339.

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, pasal 12 ayat 2.

#### D. Pendapat Ulama Tentang Syarat Adil Bagi Wali dalam Pernikahan

Adil secara *etimologis*, berasal dari bahasa arab yaitu, عَدَلَ – يَعْدِلُ – عَدْلًا

yang berarti membetulkan, meluruskan, lurus.<sup>75</sup> Dalam arti lain adil bermakna cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya.<sup>76</sup>

Adil menurut Imam Syafi'i orang yang shaleh dan orang yang tidak fasik. Pof. Muhammad Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam'ani, adil itu harus mencakup empat syarat, yaitu:

- a. Memilihara perbutan taat (amal sholeh) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa)
- b. Tidak mengerjakan dosa kecil yang sangat keji
- c. Tidak mengerjakan perbutan yang dapat merusak *muruh'ah*
- d. Tidak mengi'tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar-dasar syara'.<sup>77</sup>

Menurut Musthafa al-Khin dalam kitabnya *Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i* menyebutkan bahwa adil itu sendiri adalah tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak membiasakan dosa kecil, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi *muruh'ah* (kehormatan), seperti kencing di pinggir jalan dan sebagainya.<sup>78</sup> Jadi, yang dimaksud dengan wali adil adalah keadaan

<sup>75</sup> Mahmud Yunus, *Op.Cit.*, h. 257.

<sup>76</sup> Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 82.

<sup>77</sup> Achmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 52.

<sup>78</sup> Musthafa Al-Khin, *Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i*, Jilid IV, (Damaskus: Darul Qalam, 1992), h. 64.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang wali nikah yang tidak fasik. Tidak fasik dengan arti tidak melakukan dosa kecil maupun dosa besar dan sesuatu yang dapat mengurangi *muru'ah*.

Syarat adil bagi seorang wali, terdapat ihtilaf di kalangan ulama. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa keadilan bukanlah syarat dalam menetapkan perwalian. Oleh sebab itu, misalnya bagi wali yang adil mau pun yang fasik dapat mengawinkan anak perempuannya atau keponakan perempuan dari saudara laki-lakinya karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga masalah kerabatnya juga karena hak perwalian bersifat umum.<sup>79</sup>

Syaikh Muhammad bin Qasim al- Ghazy dalam kitabnya *Fathul Qarib Al- Mujib*, yang diterjemahkan oleh A. Hufaf Ibry mengatakan bahwa akad nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali yang adil.<sup>80</sup> Keharusan wali itu adil berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW riwayat dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ. (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu: “Tidak ada nikah kecuali dengan dua saksi adil dan wali yang mursyid.” (HR Imam Baihaqi).<sup>81</sup>

Imam Syafi’I juga meriwayatkan hadist:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ. (رواه الشافعي)

<sup>79</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 187.

<sup>80</sup> Syaikh Muhammad bin Qasim al- Ghazy, *Op. Cit.*, h. 543.

<sup>81</sup> Ahmad bin al-Husain ‘Ali bin Musa al-Khurasani al-Baihaqi, *Op. Cit.*, h. 204.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Rasulullah Shalallahu 'alaihiwasallam bersabda: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang mursyid.* (HR. Imam Syafi'i).<sup>82</sup>

Imam Syafi'i berkata: maksud *mursyid* dalam hadis tersebut adalah adil. Berdasarkan dalil di atas, salah satu ulama fikih mengatakan bahwa orang tidak adil atau fasik tidak boleh menikahkan seorang wanita mukmin dan hak kewaliannya harus dialihkan kepada wali di bawahnya. Demikian salah satu pendapat yang dikutip dari kitab *Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i* karangan Musthafa al-Khin:

*"Laki-laki yang fasik (tidak adil) tidak boleh menikahkan perempuan mukmin sehingga hak menikahkannya beralih kepada wali di bawahnya jika di bawahnya itu adil. Sebab, kefasikan adalah kekurangan yang mencederai kesaksian sehingga mencegah kewalian dalam pernikahan."*<sup>83</sup>

Maka Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi menerangkan lebih rinci lagi bahwa syarat masing-masing wali dan dua saksi membutuhkan enam syarat, yaitu:

- a. Islam, maka tidak sah orang kafir menjadi walinya seorang perempuan, kecuali terhadap sesuatu yang telah diberikan pengecualian.
- b. Baligh (sudah dewasa) maka tidak sah anak kecil menjadi walinya perempuan.
- c. Berakal sehat, maka tidak sah orang gila menjadi walinya perempuan, yang terus menerus gilanya atau kumat-kumatan.

<sup>82</sup> Musthafa Al-Khin, *Loc. Cit.*

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. Merdeka (statusnya), maka tidak sah seorang budak menjadi wali dalam mengijabkan perkawinan, tetapi dia menerima (qabul) dalam perkawinan.
- e. Laki-laki. Tidak boleh seorang perempuan menjadi wali.
- f. Adil, maka orang fasiq tidak boleh menjadi wali.<sup>84</sup>

Kemudian ia memberikan pengecualian dari syarat tersebut, yaitu perkawinan perempuan kafir *dzimmi* tidak membutuhkan kepada Islamnya si wali, demikian pula amat (hamba sahaya), tidak membutuhkan keadilan si sayyid (wali). Maka boleh (sah) walinya perempuan amat itu orang fasik. Semua persoalan yang tersebut dalam kaitannya dengan wali (dalam perkawinan) itu diiktibarkan dalam persoalan dua saksi perkawinan.<sup>85</sup>

Syaikh Zainuddin dalam kitab nya *Fathul Mu'in* juga menjelaskan bahwa disyaratkan pula bagi wali itu harus adil, merdeka bukan budak, dan keadaannya itu orang mukallaf. Maka, orang fasik selain kepala negara tidak berhak menjadi wali, karena kefasikan itu merupakan kekurangan yang membuat persaksian tercela, yang menghalangi kewalian, sebagaimana kebudakan, pendapat ini adalah mazhab as-Syafi'i sebagaimana berdasarkan Hadist Shahih: *Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali yang mursyid, yaitu adil.*<sup>86</sup>

Wahbah az-Zuhaili juga menerangkan bahwa ada tujuh syarat untuk menjadi wali, yaitu:

<sup>84</sup> Syaikh Muhammad bin Qasim al- Ghazy, *Op. Cit.*, h. 544-546.

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 546.

<sup>86</sup> Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Terj. Ali As'ad, (Yogyakarta: Menarakudus, 1979), Cet. Ke-1, h. 43.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kemampuan yang sempurna, yaitu dengan balig dan berakal. Maka, tidak ada hak kewalihan bagi anak kecil, orang gila, dan orang idiot.
- b. Sama antara agama wali dan orang yang diwalikan. Maka, tidak ada hak wilayah orang yang non muslim terhadap muslim, sebagaimana halnya tidak ada wilayah seorang yang muslim terhadap orang yang non muslim, karena kesamaan agama biasanya menjadi motivasi dan faktor utama adanya kasih sayang dan perhatian terhadap kemaslahatan.
- c. Laki-laki. Menurut jumhur fuqaha selain mazhab hanafi wali di syatkan memiliki jenis kelamin laki-laki. Oleh sebab itu, tidak ada perwalian perkawinan perempuan.
- d. Adil, yaitu kelurusan agama dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama, serta mencegah berbagai dosa besar, seperti perbuatan zina, minum khomar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa kecil. Ini adalah syarat wali menurut mazhab Syafi'i dalam salah satu pendapat mereka dan mazhab Hambali.
- e. Lurus, mkasud disini menurut mazhab Hambali adalah mengetahui kesetaraan dan maslahat pernikahan, bukan menjaga harta. Karena kelurusan pada setiap posisi sesuai dengan kapasitasnya. Menurut mazhab Syafi'i makananya adalah tidak menghambur-hamburkan harta. Kelurusan adalah syarat untuk menetapkan perwalian menurut mazhab Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dan mazhab Hambali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Wali tidak sedang melakukan haji atau umrah.
- g. Tidak melakukan pemaksaan. Oleh karena itu tidak sah perkawinan dari orang yang dipaksa.<sup>87</sup>

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i ditanyai tentang wali dalam masalah pernikahan: ar-Rabi' berkata: aku bertanya kepada imam Syafi'i tentang nikah imam syafi'i berkata: semua pernikahan tanpa ada wali adalah tidak sah (*bathil*). Ar-rabi' bertanya: apakah hujjah dalam masalah itu? Imam Syafi'i menjawab: hadist-hadist yang shahih. Adapun dari hadist Malik, sesungguhnya ia telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Alfadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas dari nabi Muhammad Saw: "*Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, dan perawan dimintai pendapat tentang dirinya dan izinnya adalah diamnya.*" Imam Syafi'i berkata; Malik telah mengabarkan kepada kami, telah sampai kepadanya bahwa Ibnu al-Musayyib berkata: Umar bin Khatthab berkata, "*Seorang wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya, atau orang bijak dari keluarganya, atau sultan (penguasa).*" Imam Syafi'i berkata: kamu menshahihkan hadist ini dan mengatakan nikah dianggap sah meski tanpa wali. Sementara kami berpegang pada hadist-hadist yang lebih shahih dan lebih jelas.

Imam Syafi'i berkata: Muslim bin Khalid dan Abdul Majid telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi Saw. Beliau bersabda: Artinya: "*Siapa saja diantara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah bhatil.*"

<sup>87</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 185-187.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Imam Syafi'i berkata: Muslim dan Sa'id telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, ia berkata, *"Pernah ada satu rombongan dalam perjalanan dan diantara mereka terdapat seorang janda. Lalu wanita itu menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki, dan si laki-laki menikahkannya dengan laki-laki dalam rombongan. Maka, maka Umar mendera orang yang menikahi dan yang menikahkan. Lalu memisahkan antara keduanya."*

Imam Syafi'i berkata: Muslim telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, ia berkata, *"Tidak ada nikah tanpa wali yang bijak dan dua saksi yang adil"*.<sup>88</sup>

Maka hal ini sejalan dengan kitab *Fiqih Mazhab Syafi'i*, dinyatakan bahwa syarat wali itu ada enam, yaitu, Islam, laki-laki, balig, berakal, merdeka, adil. Adil yang dimaksud di sini adalah orang yang menjauhi dosa besar dan tidak terbiasa melakukan dosa kecil. Setidak-tidaknya orang yang taat ibadah, seperti sholat, puasa, dan lain-lain.<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, Terj Amiruddin, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke- 2, h. 343-344.

<sup>89</sup> Ibnu Masud, Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Cet. Ke-2, h.270.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Kepala KUA Kecamatan Kubu Babussalam syarat adil (tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak membiasakan dosa kecil, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi *murū'ah* /kehormatan) sulit terimplikasikan. Karena kalau tidak melaksanakan dosa besar mungkin oke, tapi kalau tidak membiasakan melakukan dosa kecil, tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi *murū'ah*, ini tidak ada jaminan. Maka syarat syarat adil bagi wali di KUA Kecamatan Kubu Babussalam dilonggarkan sedikit. Cukup dilihat dari kecamatan lahiriyah saja dengan didukung oleh data melalui KTP wali tersebut mengenai status agama, jenis kelamin, dan penampilannya. Tidak perlu sampai dibuktikan terlalu mendetil.
2. Menurut Honor Pramubakti/Operator KUA Kecamatan Kubu Babussalam kalau dilihat dari PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, pada pasal 12 ayat 2 syarat wali itu salah satunya adalah adil. Namun adil tersebut tidak dijelaskan secara rinci, sehingga mengakibatkan multi tafsir. Jika menggunakan definisi adil menurut ulama' terdahulu tentu saja sampai detik ini tidak ada yang terpenuhi syarat adilnya wali nikah. Maka definisi adil yang diterapkan KUA Kecamatan Kubu Babussalam adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adil yang masyhur saja. Maksudnya apa yang ada dalam diri wali tersebut sesuai dengan syarat administrasi dan regulasi yang berlaku. Selain itu, dalam KHI tidak ada atau tidak tertera syarat adil bagi wali dalam perkawinan.

3. Maka penerapan syarat adil bagi wali di KUA Kecamatan Kubu Babussalam jika ditinjau menurut pendapat Imam Syafi'i maka nikahnya batal berdasarkan hadits nabi SAW. *"Tidak sah nikah kecuali dengan wali 'adil"*. Karena tidak memenuhi syarat adil. Namun demikian, hukum Islam tidaklah bersifat kaku. Artinya, walaupun secara hukum Islam pernikahan seseorang yang walinya fasik adalah batal akan tetapi masih terdapat jalan keluar agar pernikahannya tetap sah secara hukum Islam. Dengan mengikut pendapat ulama lain seperti Al-Habib Muhammad bin Salim walau mendukung pendapat tentang keadilan wali, tetapi cenderung lebih longgar. Menurutny, syarat adil wali cukup dilihat dari kacamata lahir saja, tidak perlu sampai dibuktikan terlalu mendetail. Dengan demikian, orang yang dikenal segelintir orang sebagai orang adil saja sudah cukup menjadi wali. Hal ini sesuai dengan apa yang diterapkan oleh KUA kecamatan Kubu Babussalam. Pendapat yang dikemukakan oleh Al-Habib Muhammad bin Salim dilatar belakangi oleh pandangan Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa kewalian orang fasik tetap melekat padanya. Seandainya kewalian wali nasab karena fasik dialihkan kepada wali hakim, boleh jadi wali hakim pun melakukan kefasikan serupa dengan wali nasab tadi, bahkan mungkin lebih berat.

## B. Saran

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam hendaknya membuat sebuah aturan yang baku dalam hal ini mengenai konsep wali adil terhadap hukum yang di pakai dalam kecamatan tersebut. Dimana hal ini juga harus ada makna substansial dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, PMA dan lain sebagainya. Dihubungkan dengan sebuah aturan yang ada dalam fiqh yang dihubungkan dengan budaya masyarakat daerah yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam hendaknya melakukan penyuluhan agama mengenai konsep adil seorang wali nikah yang terdapat di beberapa pendapat imam mazhab.
3. Hendaklah masyarakat di Kecamatan Kubu Babussalam sadar akan pentingnya ilmu-ilmu yang berbasis agama terlebih terkait masalah fiqh munakahat.
4. Untuk masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam khususnya laki-laki yang akan menjadi wali nikah, patuhi prosedur yang ada. Sekalipun syarat adil ini sering dikesampingkan, tapi berusaha untuk menjadi orang yang baik dan sholeh ta'at kepada perintah Allah Ta'ala. Sehingga dapat memiliki sifat-sifat yang membawa kebaikan bagi pernikahan yang dibawah perwaliannya dan demi menjaga keabsahan suatu pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2015.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mzahib Al-'Arba'ah*, Juz 4, Mesir: Darul Hadits, 2004.
- Abdul Wahbah Asy Sya'rani, *Tanbil al Mughtarrin*, Terj. E. Kusdian, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghafar E.M, Jilid. 1, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj, M. Abdul Ghoffar E.M Abdul Ihsan al-Atsari, Jilid. 8, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008.
- Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, Bairut-Libanon: Dar al-Fikri, 1994.
- Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari*, Cet. Ke-1, Kairo: Dharul Ibnu Hasim, 2004.
- Achmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad bin al-Husain 'Ali bin Musa al-Khurasani al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Fiqh*, Cet. Ke-1, Jakarta: Amzah, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. Ke- 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Al-Habib Muhammad bin Salim Hafizh, *Al Miftahu Libabin Nikah*, Terj. S. Alwi bin Isa As Seggaf, Cet. Ke-2, Bandung: Cahaya Ilmu, 2013.
- Al-Qurtubu, *Tafsir Al Qurtubi*, Terj. Ahmad Khatib, Jilid. 17, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amir Alaiddin Ali, *Shahih Ibnu Hibban*, Jilid V, Bairut-Libanon: Dar al-Fikri, 1996.
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik dan Ilmu sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, 1999.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke- 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Firdaus, Kepala Kantor Urusan Agama, *Wawancara*, di Kecamatan Kubu Babussalam, 10 Januari 2021.
- Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, ter. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2001.
- Ibnu Masud, Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Cet. Ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Terj. Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, Terj Amiruddin, Cet. Ke- 2, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006.
- Ismail al- Muqaddam, *Fiqhul Istigfar*, Terj. Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Wacana Intelektual, 2015.
- Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 2014.
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Musthafa Al-Khin, *Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i*, Jilid IV, Damaskus: Darul Qalam, 1992.
- Nasir Thalhhah Hasan Asy-Syaibani, *Tanbih Ulil Fardhi ila Tahrir al-Adhl*, Terj. Subhan Nur, Jakarta: Najla Prees, 2005.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Rafika, Honor Pramubakti/Operator KUA, *Wawancara*, Kecamatan Kubu Babussalam, 25 Januari 2021.
- Said Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawunan Islam*, Cet. Ke- 1, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Cet. Ke-1, Jakarta: Darul Falah. 2005.
- Subandi, *Psikologi Dzikir: Studi Fenomenologi Pengalaman Transformasi Religius*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Syaikh Muhammad bin Qasim al- Ghazy, *Fathul Qarib Al- Mujib*, Terj. A. Hufaf Ibry Surabaya: Al- Miftah, 2008.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafiq A. Mughni, *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Cet. Ke-1, Surabaya: Bina Iman, 1993.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid. 9, Jakarta: Gema Insani, 2016.

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, cet. ke- 1, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Zainuddin, *Fathul Mu'in*, ter. Ali As'ad, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Menarakudus, 1979.

Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Zulaidi, Pengadministrasian Umum, *Wawancara*, Kecamatan Kubu Babussalam, 14 Januari 2021.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN SYARAT ADIL BAGI WALI DALAM PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh:

Nama : **FAKHRURROZI**  
NIM : 11720114823  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

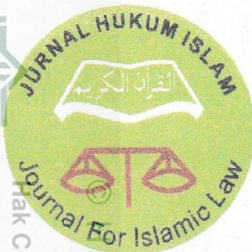
Sekretaris  
**Ilham Akbar, SH., MH**

Penguji I  
**Dr. H. Johari, M.Ag**

Penguji II  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : FAKHRURROZI

**NIM** : 11720114823

**JURUSAN** : HUKUM KELUARGA

**JUDUL** : PENERAPAN SYARAT ADIL BAGI WALI DALAM PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pembimbing: Irfan Zulfikar, M. Ag.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



**M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI

Fakhrrurrozi, ia lahir di Rantau Panjang Kiri, 11 Agustus 1999. Pria yang kerap disapa Rozi atau Oji ini merupakan putra dari pasangan Bakhtiar. R dan Aminah. Ia anak ke enam dari enam bersaudara. Semasa anak-anak, remaja hingga tumbuh dewasa, ia menghabiskan waktunya di kampung halaman, tepatnya di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Kubu Babussalam, Desa Rantau Panjang Kiri Hilir.

Seperti anak-anak pada umumnya, ia menekuni bidang pendidikan mulai dari pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 Rantau Panjang Kiri, selesai pada tahun 2005. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah STanawiyah (MTS) Mu'allimin di Rantau Panjang Kiri Hilir, selesai pada tahun 2011. Pada sekolah yang sama ia melanjutkan pendidikannya di MA (Madrasah Aliyah) selesai pada tahun 2017.

Setelah itu, ia melanjutkan study nya di perguruan tinggi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau merupakan Universitas pilihannya. Ia berada di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga angkatan 20017, selesai pada tahun 2021. Selain itu, Ia juga aktif di Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Pada MTQ tingkat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 dan 2021, ia berhasil meraih juara 1 (satu) pada cabang Menulis Makalah al-Qur'an (MMQ) atau Musabaqah Karya Tulis Ilmiah al-Qur'an (MKTIQ).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.